

Partai Hindu, Mungkinkah?

Pertanyaan tautologis di atas bukan hal baru, sudah menggejutkan sangat lawas. Bahkan semangit untuk mewijudkannya sering mengabaikan akal sehat. Pokoknya Hindu harus punya partai karena Hindu adalah juga pemilik sah republik ini, agama pertama ke Indonesia, agama tertua di dunia. Kaum primordial akan mengusung jargon "Bali Otonomi Khusus", yang dengan status istimewa ini akan merasa sama seperti Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kira-kira begitu sayup terdengar semangat (sebagian kecil) orang Hindu.

Propaganda tersebut kadang menguat, kadang melemah, tergantung angin yang dihembuskan patron-patron politik. Juga suasana kebatinan yang seolah datang teratur ketika pemilihan umum digelar dari pilkada, pilgub, pilpres. Bahkan hal-hal karena umat Hindu minoritas yang sering katanya mendapat perlakuan tidak enak, lalu secara emosional ingin membuat Partai Hindu.

Memang, pertanyaan seberapa besar kontribusi Hindu untuk negara adalah pertanyaan paling dasar dalam hidup berdemo-

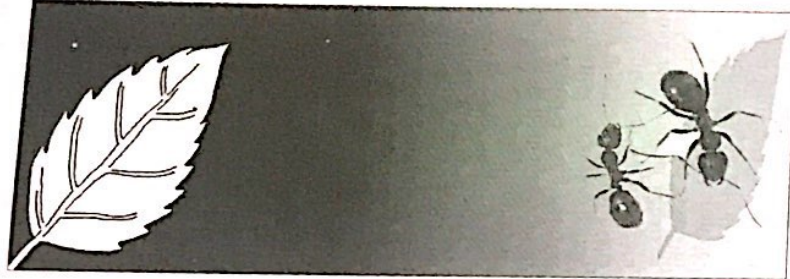
krasi. Masalahnya apakah berpolitik, sekurangnya menyalurkan aspirasi politik harus dengan cara memiliki partai?

Politik itu seni, teknik khusus untuk meraih kekuasaan, cara memelihara kepentingan. Tapi jangan lupa, esensi politik adalah untuk memengaruhi orang, mengatur orang, mem-berdayakan orang. Jauh ke belakang, Maharsi Kautilya melalui kitab Arthashastra meski tidak menyebut eksplisit bagaimana pemimpin memanfaatkan sum-ber-sumber daya, entah manusia maupun alam untuk kepentingan rakyat dianggap sebagai tindakan politik. Sekali lagi, politik itu tentang ketercairan. Jangan heran, dari adagium ini hubungan sekutu dan sekutu bisa setipis rambut para politisi.

Manusia adalah makhluk politik karena ia berada di masyarakat. Ketika negara mengaturnya, kontrak sosial disodorkan untuk dusta tanggung jawab. Hak dan kewajiban sebagai warga negara menjadi pengikat abadi hubungan itu. Dapat dimaafkan, jika sedikit saja hak antara negara dan warganya terkurangi,

Sistem politik dan demokrasi hingga kehidupan keagamaan di Indonesia masih belum jelas, penuh perdebatan. Tiang bersandar kita masih secara ringkih di antara negara agama dan negara sekuler. Abu-abu. Kemudian ini yang membedakan kita dengan India yang dengan san-tainya berkontestasi sekaligus bernegosiasi saat pemimpin dipinang. Tak jarang, Presidennya Muslim, Perdana Menternya Hindu. Pun sebaliknya, bahkan sering bergantian ber-mutasi. Indonesia, nanti dulu, kalau tidak dikatakan jangan harap banyak.

Kembali kepada Kautilya, kita bisa menyimpulkan hasrat politik sepenuh-penuhnya dengan berbagai cara. Mungkin tak perlu berujung dengan mendaftar nama Parpol ke akta notaris. Ajaran dharmaning negara dan dharmaning agama bisa sangat diandalkan menjadi buku manual untuk berada di berbagai partai politik. Tentu dengan selera masing-masing, bahkan menjadi pengurus intinya. Memasuki parpol berbasis agama tertentu di luar Hindu tentu saja tidak direkomendasi bukan untuk



mengebiri pilihan demokrasi tetapi karena alasan etika, masalah

I Nyoman Yoga Segara



moral. Dus, umat Hindu harus mewarnai dengan integritas dan kecakapannya (*hard skill* dan *soft skill* sebagai politikus) di partai apapun yang dipilihnya. Bukan sebaliknya menjadi anggota yang tak berguna, tak bersuara dan tak beridentitas. Bukan pula hanya sebagai pencari pekerjaan tambahan.

Edukasi politik bisa dilakukan melalui berbagai saluran. Materi dharmawacana atau dharmatula jangan menabukan pendididkan politik. Ormas kepe-mudaan jangan juga menjadi arena pelarian untuk adu kuat mengais rejeki dan menggerak popularitas, terlebih menggan-tungkan hidup dengan proposal kegiatan. Kesiapan umat Hindu berpolitik, apalagi memiliki partai, bisa dimulai dari kanal ini. Mari menjadi Maharsi Kautilya yang melalui politik, ia menglo-rifikasi wajahnya: politikus seka-ligus moralis.

Jadi, masih perlukah mendirikan Partai Hindu?

Penulis, antropolog IHDN
Denpasar